



Media: Republika

Hari: Senin

Tanggal: 18 Januari 2016

Halaman: 22

Bentuk Satgas KDRT Berbasis Kelurahan

Ada wacana juga untuk membangun "rumah aman".

YOGYAKARTA – Pemerintah Kota (Pemko) Yogyakarta terus memperkuat upaya dalam menekan kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayahnya. Salah satunya dengan melengkapi berbagai layanan penanganan korban pada tahun ini.

Menurut Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) Kota Yogyakarta Lucy Irawati, tahun ini pihaknya merencanakan beberapa program penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga. "Program dilakukan hingga ke wilayah," kata dia di Yogyakarta, Ahad (17/1).

Salah satu program yang akan dilakukan adalah pembentukan satuan tugas (satgas) penanganan korban KDRT. Lucy menjelaskan, Satgas KDRT ini berbasis kelurahan. Dengan begitu, ia mengharapkan, penanganan kasus KDRT dapat dilaku-

kukan lebih cepat. Selain itu, diharapkan juga adanya antisipasi dini terhadap tindak kekerasan di lingkungan masyarakat.

Menurut Lucy, anggota satgas penanganan korban KDRT ini merupakan masyarakat di wilayah itu sendiri. Nantinya, kata dia, akan dipilih warga yang dinilai bisa melaksanakan tugas yang diberikan. Bisa tokoh masyarakat, kader PKK, maupun tokoh pemuda.

Ia menargetkan 45 kelurahan di Kota Yogyakarta sudah memiliki satgas penanganan korban KDRT pada tahun ini. "Satuan tugas tersebut akan mendukung keberadaan mitra keluarga yang selama ini turut membantu penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga," ujar dia.

Selain itu, KPMP Kota Yogyakarta juga terus berkoordinasi dengan Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah (DBGAD) setempat untuk "rumah aman". Rumah aman ini ditujukan untuk tempat perlindungan sementara korban KDRT. Lucy mengatakan, pihaknya kerap merasa kerepotan saat mengamankan korban KDRT lantaran belum memiliki

tempat khusus selama kasus dalam penanganan. Menurut dia, Komisi D DPRD ikut mendorong pembangunan rumah aman itu.

Harapan pembangunan rumah aman ini pernah diungkap juga Ketua Forum Perlindungan Korban Kekerasan Yogyakarta Tri Kirana Muslidatun. Menurut dia, anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga membutuhkan lingkungan yang nyaman ketika kasusnya dalam proses penanganan. Mengingat, kata dia, kasus kekerasan ini pun biasanya melibatkan orang terdekat korban. Inilah yang bisa disediakan rumah aman. "Melalui rumah aman ini, anak-anak korban kekerasan bisa mendapat perlindungan dengan baik," kata dia.

Menurut Tri Kirana, memang sudah ada rumah aman milik Pemerintah DIY. Namun, ia menilai, fasilitas yang ada tersebut kurang representatif lantaran ruangan yang sempit dan sangat terbatas. Oleh karena itu, merujuk pada kasus kekerasan terhadap anak, ia menilai, Kota Yogyakarta perlu membangun rumah aman anak secara mandiri. "Rumah aman di DIY digunakan untuk selu-

ruh kabupaten/kota, sehingga kita butuh ada rumah tersendiri," katanya.

Tri menilai keberadaan rumah aman itu penting. Apalagi, jumlah kekerasan di wilayah Kota Yogyakarta masih tergolong banyak. Tercatat yang ditangani ada 142 kasus pada 2011, 265 kasus pada 2012, 691 kasus pada 2013, dan 642 kasus pada 2014. Sedangkan tahun lalu hingga Oktober tercatat 501 kasus. Kasus kekerasan ini terbagi dalam empat kategori, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran.

Terkait dengan pelayanan kesehatan khusus untuk korban KDRT, Pemkot Yogyakarta juga sudah memiliki aturannya. Puskesmas dan rumah sakit bisa membantu menangani korban KDRT untuk penyembuhan fisik. Sedangkan untuk penanganan psikis bisa dilakukan di Mitra Keluarga, psikolog di puskesmas, dan berbagai organisasi pemenuhan yang menjadi mitra. Sedangkan penanganan sosial dilakukan oleh petugas sosial masyarakat dan advokasi hukum dibantu oleh Lembaga Bantuan Hukum.

■ antara/julianingsih/edi irtan fitra/pala

Tindak Lanjut

Untuk Ditanggapi

Untuk Diketahui

Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kantor Pemberdayaan Masyarakat	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005